

**TUGAS AKHIR**

**TATA CARA PEROLEHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN  
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli Madya  
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH :**

**RAHIMSYAH**  
**00976008315**

**PROGRAM DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
RIAU  
2012**

**ABSTRAK**  
**TATA CARA PEROLEHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN**  
**PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA KANTOR**  
**PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS**

**Oleh :**

**RAHIMSYAH**  
**NIM.00976008315**

*Penelitian ini dilakukan di kota madya dumai yang berlangsung dari bulan februari sampai maret 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha kena pajak. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah dengan mengetahui bagaimana tata cara memperoleh Nomor pokok wajib pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusah Kena Pajak, hendaknya masyarakat umumnya dan Wajib pajak khususnya memahami dan mengerti pentingnya Nomor Pokok Wajib pajak dan nomor Pengukuhan Pengusaha Kena pajak.*

*Hasil dari penelitian berdasarkan observasi dan pengamatan langsung yakni mengetahui tata cara Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta kendala yang menyebabkan masyarakat tidak mau mendaftarkan diri untuk meperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak serta kendala bagi Wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, semua kendala itu dikarnakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi masyarakat yang taat pajak. Masyarakat dan wajib pajak beranggapan segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak merepotkan, itu dikarnakan minimnya pengetahuan tentang perpajakan.*

**Kata Kunci:** *Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis bersyukur kepada Allah SWT. atas limpahan hidayah, waktu dan nikmat sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Salawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT, yakni Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam dan menegakkan kebenaran bagi umat.

Syukur alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul *Tata Cara Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak* ,Tugas Akhir disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama kedua orang tua penulis yang tidak pernah bosan mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Purek I, II, dan III yang telah memmberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus,SP.M.Ec selaku Dekan Fakulast Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Pudek I, II, dan III yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar, M.Hum selaku ketua jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Ari Nurwahidah SE MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Mustiqowati Ummul fitriyah, M.Si selaku sekretaris jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak dan Ibu dosen serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Buat pegawai kantor pelayanan pajak pratama bengkalis yang sudah banyak membantu dalam penelitian.
8. Buat semua teman-teman Administrasi Perpajakan Angkatan 2009, sukses buat semuanya, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan kita semua menjadi orang yang sukses, Amin ya rabbal ‘alamin.....

Pekanbaru,     Maret 2011  
Penulis

**RAHIMSYAH**  
**NIM. 00976008315**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah. ....	6
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian. ....	6
1.4.Metode Penulisan Penelitian. ....	7
1.5.Sistematika Penulisan. ....	9
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>11</b>
2.1.Sejarah Singkat KPP Pratama Bengkulu. ....	11
2.2.Visi dan Misi. ....	12
2.3.Bagian dan Unit Kerja KPP Pratama Bengkulu.....	13
2.4.Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai KPP Pratama Bengkulu.....	15
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>17</b>
3.1.Tinjauan Teori .....	17
3.1.1.Pengertian Pajak .....	17
3.1.2.Fungsi Pajak.....	18
3.1.3.Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak .....	19
3.1.4.Pengelompokan Pajak .....	21

3.1.5. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak.....	22
3.1.5.1. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak.....	24
3.1.5.2. Dokumen Persyaratan Pendaftaran NPWP .....	25
3.1.5.3. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak.....	28
3.1.5.4. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha.....	29
3.1.5.5. Pengukuhan NPWP Secara Jabatan .....	30
3.1.5.6. Wajib Pajak pindah .....	30
3.1.5.7. Penghapusan NPWP.....	31
3.1.5.8. Sanksi Nomor Pokok Wajib Pajak.....	32
3.1.6. Pengertian Pengusaha Kena Pajak .....	33
3.1.6.1. Pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak .....	35
3.1.6.2. Tempat Pendaftaran NPWP dan NPPKP .....	36
3.1.6.3. Tata Cara Pendaftaran NPPKP.....	37
3.1.6.4. Lampiran yang diperlukan Formulir Pendaftaran .....	37
3.1.6.5. Fungsi NPPKP .....	39
3.1.6.6. Pencabutan PKP .....	39
3.1.6.7. Sanksi tidak Mendaftar dan Menyalahgunakan NPPKP.....	40
3.1.7. Pandangan Islam Tentang Pajak .....	41
3.1.7.1. Larangan Pajak Dalam Islam .....	43
3.1.7.2. Pajak diperbolehkan Dalam Islam .....	46
3.2. Tinjauan Praktek.....	48
3.2.1. Tata Cara Pendaftaran dan Perolehan NPWP .....	48
3.2.2. Lama Waktu Pembuatan NPWP .....	50
3.2.3. Pembuatan NPWP Secara Masal .....	50

3.2.4.Data Wajib Pajak yang Mendaftarkan NPWP .....	51
3.2.5.Tata Cara Pendaftaran dan Perolehan NPPKP .....	53
3.2.6.Data Wajib Pajak yang dikukuhkan Sebagai PKP .....	54
3.2.7.Kendala yang Menyebabkan WP tidak Mendaftarkan Diri untuk Perolehan NPWP dan Dikukuhkan Sebagai PKP .....	56
3.2.8.Langkah-langkah yang dilakukan Fiskus Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Perpajakan.....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1.Kesimpulan. ....	58
4.2.Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel III.1.Data WP yang Mendaftarkan NPWP .....	52
Tabel III.2. Data WP yang Dikukuhkan Sebagai PKP .....	55



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang di gariskan dalam peraturan Undang undang perpajakan.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong -royongan Nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan Nasional dan pembiayaan Negara.

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan Nasional tersebut melalui sistem menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*Self Assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk di pahami oleh anggota masyarakat.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah di bayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan perpajakan.

Manfaat pembayaran pajak tidak bisa dirasakan secara langsung. Ini dikarenakan pendapatan dari pajak di gunakan untuk pembangunan masa depan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ini bukan berarti orang yang membayar pajak tidak bisa merasakan manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri. Akan tetapi, segala fasilitas pelayanan umum yang kita rasakan pada saat ini merupakan wujud dari manfaat kita membayar pajak.

Apabila dilihat dari definisi pajak, pajak adalah: kontribusi rakyat kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak tersebut dapat kita pahami tentang kewajiban membayar pajak, tujuan membayar pajak dan manfaat dari membayar pajak. Hal ini di buktikan dengan adanya *Self Assessment Sistem*, yaitu: suatu sistem dalam perpajakan yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat ( wajib pajak orang pribadi atau badan ) harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak nya sendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun kenyataan nya masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar pajak, bahkan menghindar untuk membayar pajak sebagai mana yang telah di wajibkan dalam ketentuan umum perpajakan, ini dikarenakan

kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk membayar pajak atau masyarakat tersebut tidak paham dengan perpajakan.

Sesuai dengan *Self Assessment Sistem* yang di anut dalam sistem perpajakan indonesia, maka wajib pajak wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana administrasi perpajakan yang di gunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, setiap subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, mengisi surat pemberitahuan pajak, dan melaporkan pajak yang telah dibayar dan melaporkan surat pemberitahuan pajak yang telah di isi ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan langkah awal bagi setiap subjek pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan bagi setiap subjek yang telah memenuhi syarat subjektif dan obejektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Sebagaimana telah di jelaskan dalam

pasal 1(2) Undang- undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dan kemudian diubah kembali dalam Undang- undang No.28 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang KUP) menyebutkan bahwa: “ setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib pajak.

Akan tetapi bagi subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka oleh direktorat jenderal pajak akan di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan umum tata cara perpajakan.

Berdasarkan *Self Assessment Sistem* yang di anut dalam sistem perpajakan Indonesia, selain diwajibkan kepada subjek pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak diwajibkan juga kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau untuk di jadikan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak merupakan identitas kepada pengusaha yang telah di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Artinya pengusah yang telah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bisa memungut

atau memotong pajak atas kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan terhadap Pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha dan penghasilannya telah melebihi batas untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib mendaftarkan diri untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Akan tetapi apabila pengusaha tidak mendaftarkan diri untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengukuhkan pengusaha tersebut secara jabatan. Sedangkan Pengusaha yang dalam kegiatan usahanya penghasilan nya belum melebihi batas untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka bisa mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa NPWP dan PPKP sangat penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Oleh sebab itu. timbul lah keinginan penulis untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan judul: **“Tata Cara Perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis menjelaskan tentang Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha kena pajak, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimanakah Tata Cara Perolehan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusah Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis?”

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tata cara memperoleh atau mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

- a. Memberikan informasi kepada pihak- pihak yang membutuhkan dan sebagai masukan, pertimbangan serta pedoman untuk mengetahui tata cara memperoleh atau Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan perpajakan tentang perolehan Nomor Pokok Wajib pajak dan Pengukuhan Pengusaha kena pajak
- c. Menciptakan masyarakat yang sadar untuk membayar pajak

## **I.4. Metode Penelitian**

### **I.4.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dan pengambilan data ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, jalan Putri Tujuh No. 7 Kota Dumai.

### **I.4.2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2012.

### **I.4.3. Jenis Data**

#### **1.4.3.1.Data Primer**

Data primer merupakan data yang diambil atau diperoleh melalui wawancara kepada kepala bagian pelayanan, wajib pajak, dan bagian yang terkait dengan masalah penelitian penulis di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

#### **1.4.3.2.Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

#### **I.4.4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1.4.4.1.Observasi**

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan pajak Pratama Bengkulu.

##### **1.4.4.2.Interview**

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada pegawai Kantor Pelayanan pajak Pratama Bengkulu khususnya kepala seksi Pelayanan dan Tempat Pelayanan Terpadu serta kepada wajib pajak yang bisa dijadikan narasumber, dan penulis anggap bisa memberikan data dan informasi yang bermanfaat bagi penyusunan penulisan ini.

#### **I.4.5. Analisis Data**

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata, sehingga permasalahan terungkap dengan objektif.

#### **I.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penulisan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Laporan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BENGKALIS**

Bab ini menjelaskan deskripsi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, Uraian Tugas dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, serta struktur organisasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

## **BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa data tentang kendala yang menyebabkan wajib pajak tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan membahas tentang hak dan kewajiban setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi wajib pajak serta sanksi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

## **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran- saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BENGKALIS**

#### **2.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis**

Setelah adanya Otonomi Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Daerah nya sendiri. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah untuk mengatur Daerahnya sendiri dalam meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri, pajak merupakan salah satu sumber peningkatan Daerah. Ini di buktikan dengan adanya pembagian jenis pajak oleh Pemerintah dalam dua jenis, yaitu : pajak Pusat dan pajak Daerah.

Dengan demikian, pada tahun 2008 di dirikanlah sebuah Kantor Pajak Pratama Bengkalis yang melayani dalam bidang perpajakan. Sebelum didirikan kantor pelayannan pajak pratama bengkalis yang sekarang bertempat di kota Dumai, masyarakat kabupaten Bengkalis yang ingin melunasi pajak nya atau yang berkepentingan dalam bidang perpajakan, mereka harus melunasi pajak nya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Dumai. Hal ini di karnakan kabupaten Bengkalis belum memiliki Kantor Pelayanan Pajak sendiri.

Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis sekarang, pada dahulunya merupakan kantor pelayanan pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat kota Dumai dan kabupaten bengkalis. Akan tetapi, setelah Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh Dispenda maka dahulunya kantor Pajak Bumi dan Bangunan telah berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

Setelah dilakukan pemisahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan antara masyarakat kabupaten Bengkalis dan kota Dumai, maka kabupaten Bengkalis memiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis sendiri, yang berdiri di kota Dumai

jl. Putri Tujuh No 07 Dumai, dan memiliki dua KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak), yaitu: KP2KP( Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak) kota Duri dan KP2KP( Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak) Selat Panjang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi kemudahan bagi warga Bengkalis untuk memenuhi kepentingan perpajakan.

## **2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis**

### **2.2.1. Visi**

Menjadi institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi Perpajakan Modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesional yang tinggi.

### **2.2.2. Misi**

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang- undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

### **II.3. Bagian atau Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis**

Bagian Unit Kerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Jl.Putri

Tujuh No 7 Dumai terdiri dari:

1. Kepala Kantor

Nama: Rizal Imam Ganta

2. Seksi Bagian Umum

Nama: Ahmad Sarbini

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Nama: Jafliarman

4. Seksi Pelayanan

Nama: Agus Suyanto

5. Seksi Penagihan

Nama: Musprihandi

6. Seksi Pemeriksaan

Nama: Ramodh Ali Putra

7. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan I

Nama: Marsono

8. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan III

Nama: Setyo Utomo

9. Seksi Ekstesifikasi Perpajakan

Nama : Yose Hendradi

## **2.4. Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis**

### **1. Kepala Kantor**

Kepala kantor merupakan bagian tertinggi yang bertugas mengatur dan mengawasi semua seksi yang ada di bawah kepala kantor sekaligus memberi motivasi kepada bawahannya untuk meningkatkan Etos kerja demi mendapatkan Hasil yang baik dan tercapainya tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan.

### **2. Seksi Bagian Umum**

Ketua Seksi Bagian Umum bertugas di bidang pelayanan kepada pegawai kantor dan rumah tangga kantor seperti: persuratan, perlengkapan, pembinaan dan kepegawaian yang berkaitan dengan pegawai dan rumah tangga kantor.

### **3. Seksi Pelayanan**

Kepala Seksi pelayanan bertugas melakukan pengawasan dan pengarahan kepada pegawai bagian pelayanan untuk memberi pelayanan kepada wajib pajak yang datang untuk memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan, permohonan sebagai Pengusaha Kena Pajak, merekam semua Surat pemberitahuan pajak yang diterima dan sekaligus membuat surat tanda terima setoran.

### **4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Mengelola semua jenis data dan informasi yang diterima dari dalam dan luar kantor, mencetak surat pemberitahuan pajak yang telah direkan pada

tempat pelayanan terpadu, mengelola dan meneliti surat pemberitahuan yang kurang di bayar atau yang lebih bayar.

## **5. Seksi Penagihan**

Membuat keputusan yang berkaitan dengan:

Keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, menerbitkan dan melaksanakan Surat Perintah, menerbitkan dan melaksanakan surat perintah melakukan penyitaan, melakukan pelelangan atas barang yang telah disita, membuat daftar usulan yang sudah daluarsa dan menjawab permintaan tunggakan pajak dari kantor pajak lain.

## **6. Pengawasan dan Konsultasi**

- 1) Menyusun nota perhitungan dalam rangka penerbitan Surat tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Menyusun nota perhitungan dalam rangka penerbitan surat tagihan BPHTB (STB)
- 3) Membuat surat himbuan terhadap wajib pajak yang belum membayar pajak
- 4) Himbuan pembetulan surat pemberitahuan pajak (SPT)
- 5) Penertiban surat perintah membayar kelebihan pajak
- 6) Pelaksanaan rekonsiliasi data wajib pajak ( data matching)
- 7) Penerbitan bukti pemindah bukuan secara jabatan.

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **3.1.TINJAUAN TEORI**

##### **3.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2008 : 1) Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat Jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djoko Muljono (2008:1) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Azhari (2010 : 1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2008: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.



Dari definisi pajak menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang- undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Kontraprestasi tidak langsung

Pajak yang dibayar tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.akan tetapi pajak yang dibayar akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

4. Membiayai rumah tangga Negara

Pajak yang dibayar digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yakni: pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.yang tujuan akhir dari membayar pajak untuk kemakmuran masyarakat.

### **3.1.2. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.

## 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah.

Contoh pajak sebagai pengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang- barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia dp pasaran dunia.

### **3.1.3. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori- teori tersebut antara lain adalah :

#### a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak- hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karna memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

#### b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing- masing orang. Semangkin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka tinggi pajak yang harus dibayar.

#### c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

#### d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan Negeranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

#### e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan.

### **3.1.4. Pengelompokan Pajak**

#### **3.1.4.1. Menurut Golongannya**

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

#### **3.1.4.2. Menurut Sifatnya**

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkalan atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkalan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

#### **3.1.4.3. Menurut Lembaga Pemungut**

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Baik Daerah tingkat Provinsi maupun Daerah tingkat Kabupaten atau Kota.

### **3.1.5. Nomor Pokok Wajib Pajak**

#### **3.1.5.1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak**

Menurut Djoko Muljono (2008: 1) Nomor Pokok Wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Azhari (2007 : 99) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Menurut Agus Setiawan (2006 :3) Nomor Pokok Wajib pajak adalah nomor identitas wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam Undang- undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 angka 6 (pasal 1 angka 6 UU KUP) Nomor Pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kartu Nomor Pokok Wajib pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh kantor pelayanan Pajak yang berisikan Nomor pokok Wajib pajak dan identitas lainnya. Nomor Pokok Wajib pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok wajib Pajak yang dimilikinya.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan ,meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak,dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan perpajakan (pasal 1 angka 1 Undang- Undang KUP)

Wajib Pajak Terdaftar adalah wajib pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya Memiliki satu Nomor Pokok Wajib Pajak untuk semua jenis pajak yang menjadi kewajibannya. Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai 15 digit dengan penjelasan sebagai berikut:

1. 8 digit kode administrasi Wajib Pajak
2. 1 angka nomor cek digit
3. 6 digit kode administrasi Kantor Pelayanan pajak

Contoh: 01. 223344. 9. 212-000

Penjelasan:

- 1) 01 berarti Wajib pajak badan. 02, 03, 11, 12, 13 untuk bendaharawan 00, dan untuk Wajib pajak orang pribadi 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
- 2) 223344 adalah kode administrasi, nomor urut biasa

- 3) 9 adalah cek digit untuk mengecek secara program komputerisasi.
- 4) 212 adalah kode Kantor Pelayanan Pajak.
- 5) 000, Kode Pusat, 001 berarti cabang nomor 1, 002 cabang nomor 2 dan seterusnya.

Wajib pajak yang diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi seperti berikut:

1. Orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Badan usaha dalam segala bentuk termasuk BUT ( Bentuk Usaha Tetap)
3. Bendaharawan pemerintah pusat atau daerah

#### **3.1.5.2. Pendaftaran Nomor Pokok wajib Pajak**

Pendaftaran Nomor Pokok wajib pajak dapat dilakukan secara langsung oleh Wajib pajak ke Kantor Pelayanan pajak ( KPP) atau ke kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi pajak (KP2KP) dengan cara seperti berikut:

1. Pengajuan Permohonan Nomor Pokok Wajib pajak

Pengajuan permohonan Nomor Pokok Wajib pajak dilakukan oleh Wajib pajak dengan mempergunakan formulir registrasi yang diisi dengan lengkap, ditandatangani serta dikembalikan kepada Kantor Pelayanan pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak, dengan dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Apabila dokumen ditandatangani oleh orang lain maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus.

## 2. Penelitian Kelengkapan Dokumen

Surat permohonan Nomor pokok Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi pajak diteliti mengenai kelengkapan pengisian formulir dan penandatanganan , serta dokumen lampiran yang dipersyaratkan. Apabila kurang lengkap, maka akan diminta persyaratan yang kurang lengkap dan formulir dan persyaratan yang belum lengkap tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

## 3. Pemberian Nomor Pokok wajib pajak

Dalam hal permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak telah lengkap , maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lama 1 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Surat Keterangan Terdaftar adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang antara lain berisikan:

1. Nomor Pokok Wajib pajak
2. Identitas lainnya
3. Kewajiban Perpajakan Wajib pajak

### **3.1.5.3. Dokumen Persyaratan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak**

1. Terhadap Wajib Pajak orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas, misalnya PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau Karyawan.mengisi formulir pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak dengan melampirkan:



- 1) Fotokopi KTP ( Kartu Tanda Penduduk) bagi warga indonesia
  - 2) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, sekurang- kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
2. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas, misalnya Pengusaha.mengisi formulir pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak dengan melampirkan:

- 1) Fotokopi KTP ( Kartu Tanda Penduduk) bagi penduduk Indonesia
- 2) Surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.
- 3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas dari instansi yang berwenang, sekurang- kurangnya lurah atau kepala desa.
- 4) Surat Kuasa apabila permohonan tidak di tandatangani oleh pemohon.

3. Terhadap Wajib Pajak Badan

Mengisi formulir pendaftaran dan perubahan data. Dengan melampirkan:

- 1) Fotokopi akte pendirian atau perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor pusat bagi BUT (Bentuk Usaha Tetap).
- 2) Fotokopi KTP ( Kartu Tanda Penduduk) salah satu pengurus aktif dan ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang- kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing.

- 3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa .
  - 4) Surat Kuasa apabila dikuasakan.
4. Pendaftaran diri Wajib Pajak pemungut atau pemotong pajak, Misalnya Bendaharawan pemerintah. Mengisi formulir pendaftaran dan perubahan data Wajib Pajak dengan melampirkan:
- 1) Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan pemerintah
  - 2) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
5. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wanita kawin yang melakukan pemisahan harta dengan suami dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Surat perjanjian pemisahan harta
  - 2) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)

Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah apabila:

- 1) Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
- 2) Dikehendaki oleh istri untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Agar dapat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, seorang istri harus membuat perjanjian tertulis dengan suaminya yang menyatakan bahwa mereka memisahkan penghasilan dan harta. Dan jika tidak ada perjanjian secara tertulis tersebut, maka antara suami-istri tersebut cukup mengikuti Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) suaminya dan seluruh penghasilan mereka digabung menjadi satu dan dilaporkan dalam satu Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

#### **3.1.5.4. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak**

Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, sehingga kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
4. Untuk memenuhi kewajiban- kewajiban perpajakan , misalnya dalam surat setoran pajak.
5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi- instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam dokumen- dokumen yang diwajibkan. Misalnya dokumen impor (PIB) dan dokumen ekspor (PEB) pinjaman kredit bank dan lain- lain.
6. Untuk keperluan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan tahunan.

### **3.1.5.5. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha**

Menurut pasal 2 ayat (1) ,(2), dan (3), UU KUP adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Wajib pajak badan di Kantor Pajak Pratama tempat kedudukan (kantor pusat atau cabang).
3. Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak (WP) berada dalam dua atau lebih wilayah kerja Kantor Pajak Pratama (KPP), Dirjen Pajak dapat menetapkan Kantor Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar.
4. Wajib pajak orang pribadi Pengusaha Tertentu (punya usaha di beberapa tempat) wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat tinggal Wajib Pajak dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
5. Dirjen pajak diberikan wewenang untuk menetapkan tempat pendaftaran selain tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, antara lain: Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak besar, Kantor Pajak Pratama Madya, Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak Pribadi kaya, Kantor Pajak Pratama Wajib Pajak Khusus, (BUMN, BUMD, *go public*, badan dan orang asing , PMA sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per- 35/PJ-/2009 tanggal 8 juni 2009).

#### **3.1.5.6. Pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan**

Terhadap Wajib pajak yang telah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) , tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri, dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata Orang Pribadi atau Badan tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemberian Nomor Pokok Wajib pajak secara jabatan tersebut dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui penelitian ataupun pemeriksaan berdasarkan data- data Wajib Pajak.

#### **3.1.5.7. Wajib Pajak Pindah**

Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baru dengan ketentuan:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas, adalah: surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa).

b. Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusaha

Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

c. Wajib Pajak Badan

Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, adalah: surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru.

### **3.1.5.8. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak**

#### **3.1.5.8.1. Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak Orang Pribadi**

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan pada Orang Pribadi yang:

1. Meninggal dunia
2. Pindah alamat diluar kantor Pelayanan pajak Pratama (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar

#### **3.1.5.8.2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan**

Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak Badan dapat dilakukan karena:

1. Wajib pajak Bubar
2. Wajib pajak dilikuidasi
3. Wajib Pajak melakukan penggabungan
4. Wajib Pajak Badan tunggal pindah alamat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di mana Wajib Pajak terdaftar.

#### **3.1.5.8.3. Penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak Bendaharawan**

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak bendaharawan dapat dilakukan karena:

1. Proyek yang dikelola bendaharawan sudah selesai
2. Kantor yang dikelola bendaharawan sudah tutup.

### **3.1.5.9. Sanksi Nomor Pokok Wajib pajak**

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib pajak atau Pengukuhan Pengusaha kena Pajak, dan atas perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana Penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (tahun) dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut diatas ditambah 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa Hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengusaha kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restetusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restetusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restetusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

### **3.1.6. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

#### **3.1.6.1. Pengertian Pengusaha Kena pajak**

Menurut Azhari (2007 : 111) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan kegiatan perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari Daerah pabean ,melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa yang tidak berwujud dari luar Daerah pabean.

Menurut Djoko Muljono (2008:11) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya akan:

1. Menghasilkan barang.
2. Mengimpor barang.
3. Mengekspor barang.
4. Melakukan usaha perdagangan .
5. Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean.
6. Melakukan uasah jasa, atau
7. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean .

Menurut Agus Setiawan (2006: 5) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah nomor identitas wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak



dan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Mardiasmo (2008: 27) Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan Barang tidak Berwujud dari luar Daerah Pabeanm melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean. Sedangkan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusah yang diKenai Pajak Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

### **3.1.6.2. Pendaftaran Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kecil, harus mendaftarkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak(PKP).

Pengusaha Kecil adalah : Pengusaha yang mempunyai peredaran usaha samapi dengan enam ratus juta rupiah (600.000.000,00). Pengusah Kecil tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun demikian bagi Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusaha Kecil memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Pengusaha Kecil tidak memilih sebagai Pengusaha kena Pajak, tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kena Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) UU KUP dijelaskan, setiap Wajib pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- undang Pajak

Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

#### **3.1.6.3. Tempat Pendaftaran Untuk Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak**

Tempat pendaftaran untuk menjadi Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Pengusaha adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Kantor Direktorat Jenderal Pajak) yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Sedangkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha berbeda dengan tempat kegiatan usaha dilakukan, maka terhadap wajib pajak tersebut wajib juga melaporkan usahanya di Kantor Wilayah KPP ( Kantor Pelayanan Pajak) di tempat usaha dilakukan. Hal ini sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 2 ayat (2) UU KUP.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Sedangkan bagi Pengusaha Badan, kewajiban melaporkan usahanya tersebut adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa Wilayah Kantor Direktorat Jenderal Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di Kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan maupun di Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

#### **3.1.6.4. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

##### **3.1.6.4.1. Tata Cara Pendaftaran**

Wajib pajak yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dapat dilakukan dengan cara:

1. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran.
2. Pengisian dan penandatanganan formulir pendaftaran dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus, dengan melampirkan surat kuasa.
3. Penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak yang telah di isi dan ditandatangani , dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang telah diberi kuasa penuh.

##### **3.1.6.4.2. Lampiran yang Diperlukan pada Formulir Pendaftaran**

Untuk melakukan pendaftaran sebagaimana yang telah dimaksud, diperlukan lampiran formulir pendaftaran sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas.

Harus melampirkan:

- 1) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga bagi penduduk indonesia.
- 2) Paspor bagi wajib pajak orang asing, ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang- kurangnya lurah atau kepala desa.

2. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas. Harus melampirkan:

- 1) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga bagi penduduk indonesia, atau paspor bagi wajib pajak orang asing ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang sekurang- kurangnya dari Kepala Desa atau Lurah.
- 2) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerja bebas dari insatnsi yang berwenang sekurang- kurangnya dari kepala desa atau lurah.

3. Wajib Pajak badan

- 1) Fotokopi Akte Pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap.
- 2) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi Penduduk indonesia, atau paspor bagi wajib pajak orang asing, ditambah surat keterangan tempat tinggal dari insatnsi yang berwenang sekurang- kurangnya lurah atau kepala desa , dari salah seorang pengurus aktif.

- 3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang- kurangnya lurah atau kepala desa.

#### **3.1.6.5. Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Sebagai identitas Pengusaha Kena pajak (PKP) yang bersangkutan.
2. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Untuk pengawasan administrasi perpajakan.

#### **3.1.6.6. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

Direktorat jenderal pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan Pencabutan Pengusaha kena Pajak. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha kena pajak dapat dilakukan dalam hal:

1. Pengusah Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan pajak lain.
2. Sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Pengusah kena Pajak. Termasuk Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah predaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusah Kecil (600.000.000,- setahun).

### **3.1.6.7. Sanksi Tidak Mendaftarkan dan Menyalahgunakan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak**

1. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan diri memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mengukuhkan pengusaha tersebut menjadi Pengusaha Kena Pajak ( pasal 2 ayat 4) dan kepadanya akan diberikan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) secara jabatan kemudian berdasarkan NPPKP dilakukan pemeriksaan.
2. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud di atas di mulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Psl 4a UU No 28 th 2007).
3. Sanksi untuk kasus-kasus seperti di bawah ini:
  - 1) Tidak mendaftarkan diri.
  - 2) Menyalahgunakan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha kena pajak).
  - 3) Menggunakan tanpa hak NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha kena Pajak).

Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara (selain diberikan nomor secara jabatan) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang, yang tidak atau kurang bayar paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (Psl 39 ayat 2 UU No tn 2007).

4. Pidana di atas di tambah 1(satu) kali menjadi 2 (dua) kali apabila seseorang melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan sebelum lewat lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan . (Psl 39 ayat UU No 28 th 2007).
5. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha kena Pajak) dalam rangka mengajukan restetusi atau melakukan kompensasi atau pengkreditan pajak di pidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restetusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restetusi yang dimohon dan kompensasi yang dilakukan Wajib pajak. (Psl 39 ayat 3 UU No 28 th 2007).

### **3.1.7. PANDANGAN ISLAM TENTANG PAJAK**

Pajak yang terutang dalam agama Islam tertulis dalam al- Qur'an surat At-Taubah ayat 29:

Artinya : Perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di haramkan oleh Allah dan Rosulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang- orang yang diberikan



Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At- Taubah: 29)

Jizyah di sini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang- orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi jaminan keamanan dari mereka.

Dalam istilah bahasa Arab pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut imam al-Ghazali dan imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Adapun pajak menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

Artinya:

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.”

### 3.1.7.1. Larangan Pajak Dalam Islam

Berdasarkan istilah-istilah (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-'Usyur), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. di antara dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

1. Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.”(QS. An-Nisa’: 29).

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

2. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَلَا تَظْلِمُوا، أَلَا تَظْلِمُوا، أَلَا تَظْلِمُوا، إِنَّهَا يَحِلُّ مَا لِمَرْءٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh Al-

Albani dalam Shahih wa Dha'if Jami'ush Shagir no.7662, dan dalam Irwa'al Ghalil no.1761 dan 1459)

3. Hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais radhiyallahu 'anha, bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لَيْسَ فِي مَالِ الْحَقْسِ بِالزَّكَاةِ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. ” (HR Ibnu Majah I/570 no.1789). Hadits ini dinilai dho'if (lemah) oleh syaikh Al-Albani karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah (Maimun), menurut imam Ahmad bin Hanbal dia adalah dha'if hadistnya, dan menurut Imam Bukhari, 'dia tidak cerdas').

4. Hadits Buraidah radhiyallahu 'anhu

dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentangnya:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَ بِهَا صَاحِبُكُمْ لَغُفِرَ لَهُ

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 no.4442. dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah hal. 715-716)

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran dan hikmah yang agung diantaranya ialah, “Bahwasanya pajak termasuk seburuk-buruk kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat kelak.”

#### 5. Hadits Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu

Saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim).”(HR. Abu Daud II/147 no.2937. Hadist ini dinilai dho’if oleh syaikh Al-Albani)

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menggolongkan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara zhalim dan semena-mena, sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazm di dalam Maratib al Ijma’, Imam adz-Dzahabi di dalam bukunya Al-Kabair, Imam Ibnu Hajar al-Haitami di dalam az- Zawajir ‘an Iqtirafi al Kabair, Syaikh Shiddiq Hasan Khan di dalam ar-Raudah an-Nadiyah, Syaikh Syamsul al-Haq Abadi di dalam Aun al-Ma’bud dan selainnya.

### **3.1.7.2. Pajak diperbolehkan Dalam Islam**

Pajak boleh diambil dari kaum muslim, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah imam al-Juwaini di dalam kitab Ghiyats al-Umam hal. 267, Imam al-Ghazali di dalam al-Mustashfa I/426, Imam asy-Syathibi di dalam al-I'tishom II/358, Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin II/336-337.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: *Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (Suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Para ulama yang membolehkan Pemerintahan Islam memungut pajak dari kaum muslim, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Negara komitmen dalam penerapan syariat Islam.
2. Negara sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh musuh.

3. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al 'usyur, kecuali dari pajak.
4. Harus ada persetujuan dari para ulama dan tokoh masyarakat.
5. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari-orang kaya saja, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat.
6. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
7. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.

### **3.2.TINJAUAN PRAKTEK Pada KPP Pratama Bengkalis**

Pada sub bab ini data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan variabel-variabel yang dikaji selanjutnya dikaitkan dengan teori yang ada. Proses analisis data ditujukan untuk menemukan suatu hasil atau hal apa yang sebenarnya terdapat di lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian tersebut dan pada akhirnya peneliti dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya.

#### **3.2.1 .Tata Cara pendaftaran dan perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak**

Tata cara pendaftaran dan perolehan NPWP dapat dilakukan dengan dua cara:

##### **3.2.1.1.Pendaftaran Secara Manual**

1. Calon Wajib Pajak (WP) datang pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dilakukan dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan.
2. Calon WP mengisi formulir alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha pada formulir didasarkan pada kenyataan atau menurut keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan jenis formulirnya, adapun jenis formulir tersebut terdiri dari: formulir WP OP, formulir WP Badan, formulir Bendaharawan. Dari tiga jenis formulir pendaftaran NPWP tersebut memiliki perbedaan syarat dalam pengisiannya. Untuk formulir WP OP diisi berdasarkan identitas WP yang tertera pada KTP yang berlaku, formulir WP Badan diisi berdasarkan status badan (Cabang atau Pusat), sedangkan untuk formulir bendahara diisi oleh satuan kerja atau instansi bendahara.

3. Dilengkapi dengan surat kuasa apabila formulir di tandatangani oleh orang lain.
4. Setelah formulir diisi kemudian diserahkan kepada pegawai yang bertugas melayani atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan NPWP.
5. Kemudian data yang telah diisi calon WP dimasukkan kedalam sistem komputer oleh pegawai yang bertugas.
6. Setelah itu WP diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara sebelum kartu NPWP diterbitkan.

#### **3.2.1.2.Pendaftaran secara Elektronik**

Pendaftaran NPWP secara elektronik atau lebih dikenal dengan sistem Online (atau e- Registration) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jendral Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak.

Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh WP yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran WP secara Online dan sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

Cara pendaftaran secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. Cari situs Direktorat Jendral Pajak di internet dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
2. Pilih menu e- reg (*electronic registration*)



3. Pilih menu, buat account baru dan isilah kolom sesuai yang diminta
4. Setelah itu masuk ke menu “ Formulir Registrasi WP OP” isilah sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang anda miliki
5. Setelah keluar SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan maka cetak SKT sementara tersebut sebagai bukti sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP).

### **3.2.2.Lama Waktu Pembuatan Kartu NPWP**

Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) secara Manual dan Elektronik, lama pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak) nya adalah satu (1) hari kerja, dengan syarat: untuk pendaftaran manual dengan membawa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sementara yang telah diberikan oleh pegawai yang bertugas melayani NPWP (Nomor pokok Wajib Pajak). Sedangkan pendaftaran secara elektronik dengan membawa SKT (Surat Keterangan Terdaftar) sementara yang telah kita cetak pada saat melakukan pendaftaran online dan dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### **3.2.3.Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Masal**

Pembuatan Nomor Pokok Wajib pajak secara Masal adalah: pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan permohonan yang diajukan oleh suatu insatnsi atau badan agar Kantor pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan atau membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejumlah Karyawan atau Pegawai yang telah disebut dalam surat permohonan untuk pembuatan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Permohonan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak secara masal hanya dapat dilakukan oleh suatu instansi atau badan, dengan tujuan untuk

mempermudah dalam penerbitan Nomor pokok Wajib pajak (NPWP) Karyawan atau Pegawai dalam suatu instansi atau perusahaan yang mana Karyawan dan Pegawai nya berasal dari daerah yang berbeda.

Permohonan Nomor Pokok Wajib pajak secara masal tidak bisa diajukan oleh Orang Pribadi (OP), karna pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi harus datang sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak tinggal atau melalui sistem Online (e- NPWP).

Syarat- syarat permohonan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak secara masal:

1. Surat permohonan yang berisikan tentang permohonan pembuatan Nomor pokok Wajib Pajak secara masal.
2. Nama-nama karyawan atau pegawai yang diajukan untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak berserta Kartu Tanda Pengenal (KTP).
3. Keterangan jabatan yang diduduki oleh karyawan atau pegawai.

#### **3.2.4. Data Wajib Pajak yang Mendaftarkan Nomor pokok Wajib Pajak**

Dalam kurun waktu tiga tahun terdapat perbedaan jumlah keseluruhan wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, baik wajib pajak Orang Pribadi (WP OP) ataupun Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dilihat dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Perbedaan jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis akan ditampilkan dalam table di bawah ini:

**Tabel.III.1.**

**Data Wajib Pajak yang Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis**

Tahun Pajak	2009	2010	2011
Wajib Pajak Orang Pribadi	1200	1354	1142
Wajib Pajak Badan	766	903	881
Jumlah Keseluruhan	1966	2257	2023

*(Sumber: Kantor Pelayanan pajak Pratama Bengkalis)*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terjadi peningkatan dan penurunan Wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dan dapat dilihat juga bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak apabila dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak meningkat sebesar 154 Wajib Pajak OP, sedangkan tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 212 Wajib Pajak OP. sedangkan untuk Wajib Pajak Badan dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 137 Wajib Pajak Badan. Dan untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan Wajib Pajak Badan yang mendaftarkan NPWP sebesar 22 Wajib Pajak Badan. Sedangkan untuk jumlah keseluruhan wajib pajak yang mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 291 Wajib Pajak, sedangkan dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 234 Wajib Pajak. Melihat kenyataan dari table di atas maka dari pihak Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis perlu melakukan upaya-upaya guna meningkatkan pelayanan untuk Wajib Pajak. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis juga harus bekerja keras mensosialisaikan hal-hal yang terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

### **3.2.5.Tata Cara Pendaftaran dan Perolehan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)**

Tata cara pendaftaran dan perolehan NPPKP dilakukan dengan dua cara:

#### **3.2.5.1.Secara Manual**

1. Setiap wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.
2. Mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh salah satu pegawai yang berwenang dalam perusahaan.

#### **3.2.5.2.Secara Elektronik**

Pendaftaran sebagai PKP sebaiknya dilakukan dengan cara: wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan, akan tetapi pendaftaran secara elektronik dapat juga dilakukan oleh wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu dengan cara: mengikuti prosedur pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang dilakukan secara Online atau e-reg (*electronic registration*). Kemudian

mencentang atau memberi tanda (X) pada kolom permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka secara Online pihak kantor pajak akan menanggapi permohonan wajib pajak tersebut dengan cara memberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara kepada wajib pajak yang melakukan permohonan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan wajib pajak harus mencetak surat keterangan terdaftar sementara dan mengantar surat tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak mendaftar, kemudian wajib pajak akan memberi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang asli kepada Wajib Pajak tersebut.

#### **3.2.6.Data Wajib Pajak yang Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak**

Dalam kurun waktu tiga tahun (2009-2011) terdapat beberapa Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Wajib Pajak tersebut terdiri Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam kurun waktu tiga tahun (2009-2011) tersebut terjadi peningkatan dan penurunan jumlah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Peningkatan dan penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel.III.2.**

**Data Wajib Pajak yang Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis**

Tahun Pajak	2009	2010	2011
PKP OP	02	16	14
PKP Badan	189	136	299
Jumlah PKP	191	152	313

*(Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak Badan lebih banyak dibandingkan dengan PKP Orang Pribadi. Untuk Wajib Pajak orang Pribadi yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dari tahun 2009-2010 mengalami peningkatan sebanyak 14 Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sedangkan untuk tahun 2010-2011 mengalami penurunan sebanyak 2 Wajib pajak Orang pribadi.

Untuk Wajib Pajak Badan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilihat dari tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebanyak 53 Wajib Pajak Badan, sedangkan dilihat dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebanyak 163 Wajib Pajak Badan yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila dilihat secara keseluruhan jumlah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebanyak 53 Wajib Pajak, sedangkan untuk tahun 2010-2011 mengalami peningkatan sebanyak 161 Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Maka dari pada itu pihak KPP Pratama Bengkalis perlu melakukan upaya-upaya

guna meningkatkan pelayanan Wajib Pajak dan pihak KPP Pratama Bengkalis juga dituntut untuk bekerja keras dalam mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan tata cara pendaftaran dan perolehan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

### **3.2.7. Kendala yang Menyebabkan Wajib Pajak tidak Mendaftarkan Dirinya Untuk Perolehan NPWP dan Untuk Dikukuhkan sebagai PKP**

Berdasarkan temuan penulis dilapangan, diperoleh beberapa kendala yang menyebabkan Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk taat pajak.
2. Masyarakat beranggapan segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak merumitkan.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang perpajakan.

### **3.2.8. Langkah-langkah yang Dilakukan Fiskus Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Perpajakan**

Untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam perpajakan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi Pajak adalah: tindakan yang dilakukan oleh fiskus dalam menjaring Wajib Pajak dengan cara melakukan survey langsung kelapangan. Misalnya para pengusaha yang membuka usaha di sebuah mall, diperiksa oleh fiskus apakah mereka sudah mempunyai NPWP atau belum, jika belum maka akan diberikan himbauan agar

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Jika dalam waktu tertentu tidak ada tanggapan dari pengusaha tersebut, maka pihak fiskus memberikan NPWP secara jabatan, dan pengusaha tersebut harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

## 2. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi Pajak adalah: tindakan yang berasal dari Wajib Pajak sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, baik itu karna adanya kepentingan pribadi, misalnya untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi dimana wajib pajak bisa mendapatkan atau mengajukan kredit dan dapat juga untuk membuat jenis usaha.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Secara Manual dan Secara Elektronik.
2. Untuk pendaftaran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebaiknya Wajib Pajak langsung datang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Kegiatan usahanya dilakukan.
3. Formulir Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari tiga jenis, yaitu: Formulir WP OP (wajib pajak orang pribadi), Formulir WP Badan, dan Formulir WP Bendaharawan.
4. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara Manual dengan mendatangi langsung Kantor Pelayanan pajak dimana terdaftar dengan lama pembuatannya satu hari kerja dengan membawa Surat Keterangan Terdaftar sementara, sedangkan secara Elektronik dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa Surat Keterangan Terdaftar sementara yang telah dicetak pada saat melakukan pendaftaran secara Elektronik.

## **4.2.Saran**

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis seharusnya menampilkan petunjuk pengisian formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada saat Wajib Pajak meminta formulir permohonan.
2. Untuk Kantor Pelayanan pajak Pratama Bengkalis hendaknya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara Sosialisasi Pajak. khususnya tentang tata cara perolehan Nomor Pokok Wajib pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak demi menciptakan masyarakat yang taat pajak.
3. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis hendaknya memberikan penyuluhan secara menyeluruh ke Daerah Kabupaten Bengkalis agar masyarakat faham dengan perpajakan .
4. Untuk Wajib Pajak hendaknya melunasi kewajiban perpajakannya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP) agar tidak dikenakan sanksi dan denda perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Dadi, *Peraturan Perpajakan; Edisi 1*, CV Andi offset, Yogyakarta, 2003.
- Azhari, Pengantar : *Perpajakan dan Hukum Pajak*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007.
- Bohari, *Pengantar Hukum pajak*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008.
- Devano, sony, *Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Diana, Anastasia, *Konsep, aplikasi, dan Penuntun Praktis*, CV Andi Offset, 2009.
- Harahap, Azwar, *Kuangan Negara; Edisi 1*, UIN Suska Press, Pekanbaru, 2008.
- Kurnia, Siti, *Perpajakan Indonesia, Teori dan Teknis Perhitungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*, Andi, Yogyakarta, 2008.
- Muda, Markus, *Perpajakan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2005.
- Muljono, Djoko, *Ketentuan Umum Perpajakan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta. 2008.
- Muljono, Joko, *Panduan Brevet Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Nurmatu, Safri, *Pengantar Perpajakan; Edisi 2*, Granit, Jakarta, 2003.
- Purwono, Herry, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Rahman, Arif, *STEP BY STEP Menghitung Sendiri Pajak UKM*, Media Presindo, Yogyakarta, 2009.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Praktek; Edisi 4, Salemba Empat*, Jakarta, 2008.
- Rusjdi, Muhammad, *Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan; Edisi 4*, PT Indeks, 2007.
- Setiawan, Agus, *Perpajakan Umum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia; Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.